

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja merupakan prestasi kerja yang dapat dicapai dalam periode waktu tertentu. Untuk dapat mencapai prestasi kerja sesuai target atau waktu tertentu maka pemerintah daerah dituntut untuk melakukan tugasnya dengan baik dan transparan.

Lahirnya Undang-Undang (UU) 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 3 Tahun 2008 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik awal dimulainya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Adanya undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah tingkat Kabupaten untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pengendalian dan evaluasi sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan semua potensi yang dimiliki dalam rangka membangun dan mengembangkan daerahnya. Pertimbangan dasar terselenggaranya otonomi daerah adalah keterbukaan dan kemandirian (Desentralisasi) secara transparan, efektif, efisiensi

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. Dengan otonomi daerah pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah telah ditetapkan pada peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 105 Tahun 2000 yang menegaskan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara otonomi, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparan, akuntabilitas dan keadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai. Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari besarnya penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian suatu daerah yang kinerjakeuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kerja keuangannya. Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah berbasis anggaran, keuangan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja.

Salah satu instrument yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh kemampuan daerah didalam menjalankan kegiatan pembangunan dan kegiatan pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat adalah melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai rencana pembangunan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka, masyarakat atau publik merupakan pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan anggaran daerah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya anggaran daerah atau Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum bagi masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. Penyelenggaraan anggaran daerah memang tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pihak eksekutif, namun harus merupakan suatu kebersamaan antara eksekutif, legislative dan masyarakat dalam arti luas (meliputi perwakilan dari

warga pemuka adat, tokoh masyarakat, kalangan akademisi dan LSM). Kesadaran bahwa penyelenggaraan anggaran daerah merupakan amanat rakyat menjadi sangat penting bagi terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan keuangan daerah.

Untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya antara lain dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan ini terdiri dari:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal yaitu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah yaitu (Efektivitas) menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dan (Efisiensi) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

4. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal.
5. Rasio Pertumbuhan yaitu menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari period eke periode lainnya.

Jadi analisis kinerja keuangan ini sangat penting karena dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi kinerja serta membantu mengungkapkan dan memecahkan masalah yang ada.

Implikasi adanya otonomi daerah dan daerah otonom yang berdasarkan asas desentralisasi telah memberikan dampak positif bagi daerah. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya Pemekaran Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang hampir terjadi diseluruh Indonesia salah satu daerah hasil dari pemekaran wilayah adalah Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 12 Kecamatan dan 127 Desa. Tujuannya adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien, serta diharapkan mempercepat pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, disamping melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah juga perlu memprioritaskan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil seperti di Kabupaten Malaka.

Kemampuan pemerintah Kabupaten Malaka dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten Malaka baik langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan serta pelayanan sosial kemasyarakatan.

Tabel 1.1

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017 - 2019

No	Uraian	Tahun 2017		%	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan									
1.1	Pendapatan Asli Daerah	53.308.478.854	54.789.189.990	102,78	44.644.364.770	41.059.361.102	91,97	56.326.116.137	49.196.959.328	87,34
1.2	Pendapatan Transfer	669.616.444.026	653.693.624.521	97,62	592.066.829.000	581.709.695.807	98,25	655.748.616.000	625.635.999.514	95,41
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah	112.345.351.527	115.030.174.186	102,39	150.191.044.345	131.045.062.688	87,25	162.810.380.887	165.744.704.830	101,8
	Jumlah Pendapatan	835.270.274.407	823.512.988.697	98,59	786.902.238.115	753.814.119.597	95,8	874.885.113.024	840.577.663.672	96,08
2	Belanja									
2.1	Belanja Operasi	409.580.605.576	387.240.987.754	94,55	425.889.155.352	394.858.030.256	92,71	430.267.140.309	416.497.410.707	96,8
2.2	Belanja Modal	255.369.170.798	222.048.971.977	86,95	157.530.189.047	128.957.638.492	81,86	192.106.179.073	141.074.742.408	73,44
2.3	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000	10.000.000.000	100,00	8.000.000.000	7.918.000.000	98,98	340.288.064		0,00
	Jumlah Belanja	915.295.420.041	826.431.213.709	90,29	853.619.701.339	772.784.467.690	90,53	896.345.601.124	797.918.379.615	89,02

Sumber : Kantor BPKPD Kabupaten Malaka

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017-2019 pada pemerintah daerah kabupaten malaka menunjukkan presentase diantaranya pendapatan daerah yang menunjukkan presentase sebesar 95,8% - 98,59 dan belanja daerah dengan presentase sebesar 89,02% - 90,53% dapat dijelaskan bahwa:

Pada tahun 2017 Jumlah Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp 853.270.274.407 terealisasi Rp. 823.512.988.697 atau 98,59% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp. 53.308.478.854 terealisasi Rp. 54.789.189.990 atau 102,78%. Dana Perimbangan dengan target sebesar Rp. 669.616.444.026 terealisasi Rp. 653.693.624.521 atau 97,62% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target sebesar Rp. 112.345.351.527 terealisasi Rp. 115.030.174.186 atau 102,39%.

Pada tahun 2018 Jumlah Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp 786.902.238.115 terealisasi Rp. 753.814.119.597 atau 95,8% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp. 44.644.364.770 terealisasi Rp. 41.059.361.102 atau 91,97%. Pendapatan transfer dengan target sebesar Rp. 592.066.829.000 terealisasi Rp. 581.709.695.807 atau 98,25% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp. 150.191.044.345 terealisasi Rp. 131.045.062.688 atau 87,25 %.

Pada tahun 2019 Jumlah Pendapatan Daerah dengan target sebesar Rp 874.885.113.024 terealisasi Rp. 840.577.663.672 atau 96,08% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah dengan target sebesar Rp. 56.326.116.137 terealisasi Rp. 49.196.959.328 atau 87,34%. Dana perimbangan dengan target sebesar Rp.

655.748.616.000 terealisasi Rp. 625.635.999.514 atau 95,41% dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan target sebesar Rp. 162.810.380.887 terealisasi Rp. 165.744.704.830 atau 101,8 %. Dari realisasi anggaran pendapatan tahun 2017-2019 angka presentase realisasi masih mengalami naik turun yaitu 95,8% - 98,59%, dimana terendahnya 95,8% yang berarti tingkat pencapaiannya cukup efektif pada tahun 2017 dan angka tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu 98,59% yang berate cukup efektif juga, akan dikatakan efektif efektif apabila pencapaiannya mencapai 100%.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat juga bahwa Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2017-2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka menunjukkan presentase 89,02% - 90,53%. Dapat dijelaskan bahwa:

Pada tahun 2017 jumlah belanja sebesar Rp 915.295.420.041 terealisasi Rp. 826.431.213.709 atau 90,29% yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 409.980.605.576 terealisasi Rp. 387.240.987.754 atau 94,55%. Belanja Modal sebesar Rp. 255.369.170.798 terealisasi Rp. 222.048.971.977 atau 86,95%. Dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 10.000.000.000 terealisasi Rp.10.000.000.000 atau 100,00%.

Pada tahun 2018 jumlah belanja sebesar Rp 853.619.701.339 terealisasi Rp. 772.784.467.690 atau 90,53% dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 425.889.155.352 terealisasi Rp. 394.858.030.256 atau 92,71%. Belanja Modal sebesar Rp. 157.530.189.047 terealisasi Rp. 128.957.638.492 atau 81,86%. Dan Belanja tak Terduga sebesar Rp. 8.000.000.000 terealisasi Rp. 7.918.000.000 atau 98,98%.

Pada tahun 2019 jumlah belanja sebesar Rp 896.345.601.124 terealisasi Rp. 797.918.379.615 atau 89,02% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 430.267.140.309 terealisasi Rp. 416.497.410.707 atau 96,8%. Belanja modal sebesar Rp. 192.106.179.073 terealisasi Rp. 141.074.742.408 atau 73,44%. Dan belanja tak terduga sebesar Rp. 340.288.064. dari perbandingan laporan realisasi anggaran belanja tahun 2017-2019, angka presentase realisasi belanja masih mengalami naik turun yaitu 89,02% – 90,53% dimana angka terendahnya 89,02% yang berate tingka pencapaiannya tidak efektif yaitu pada tahun 2019 dan presentase angka tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu 90,53% yang berate tingkat pencapaiannya cukup efektif.

Dari penjelasan perbandingan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2019 angka presentase realisasi baik pendapatan maupun belanja masih mengalami naik turun dan banyak anggaran yang tidak terealisasi dikarenakan pemerintah belum secara matang dalam melakukan perencanaan program dan proyek pemerintah. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Terdapat selisih antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasi yang menunjukkan adanya efesiensi pada setiap belanja dan pendapatan serta mempunyai tujuan yang berbeda yang menyebabkan anggran pendapatan dan belanja tidak terealisasi dengan baik sehingga program dan kegiatan yang direncanakan belum dapat terlaksana dengan baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Menurut Sucipto (2005) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingka pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Maka dari itu setiap potensi untuk mengelola keuangan daerah dalam pelaksanaan untuk menghitung anggaran suatu daerah harus sesuai dengan standar masing-masing dan dapat dipakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan demikian akan terciptanya anggaran daerah yang lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan kondisi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2019.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2019 yang dilihat berdasarkan Analisis Deskriptif Kualitatif?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2019 yang dilihat berdasarkan Analisis Rasio

Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian?

1.3 Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2019 yang dilihat berdasarkan Analisis Deskriptif Kualitatif?
2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2019 yang dilihat berdasarkan Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian?

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka
Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi Instansi Pemerintah Daerah didalam mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien khususnya dengan pendekatan rasio keuangan dalam menentukan kebijakan, arah dan strategi didalam perbaikan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dimasa yang akan datang.
2. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada para pembaca dan memperluas wawasan pembaca tentang Kinerja Keuangan

Daerah khususnya keuangan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka.

3. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai rasio-rasio yang digunakan dalam menganalisis Laporan Keuangan terhadap APBD untuk mengetahui Kinerja Pemerintah Dearah Kabupaten Malaka serta dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.